

**PENGARUH LATIHAN GABUNGAN *SUPER GARUDA SHIELD*
TERHADAP DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-TIONGKOK
(STUDI KASUS: LAUT NATUNA UTARA)**

Oleh : Rifky Putra Ramadhan

Pembimbing : Saiman Pakpahan

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Latihan Gabungan *Super Garuda Shield* terhadap diplomasi pertahanan Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna Utara, wilayah sengketa maritim akibat klaim Tiongkok yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana Indonesia dengan Amerika Serikat dalam latihan gabungan tersebut serta dapat memengaruhi strategi diplomasi pertahanan bilateral, termasuk sebagai sinyal politik *balance of threat* terhadap klaim dari Tiongkok.

. Perspektif yang digunakan adalah neoliberalisme dengan level analisis negara, serta teori *balance of threat* dari Stephen Walt sebagai kerangka konseptual utama. Penelitian ini menemukan bahwa Latihan Gabungan *Super Garuda Shield* berperan sebagai instrumen peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia dan sinyal politik untuk menyeimbangkan ancaman Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam diplomasi bilateral. Peran tersebut mencakup peningkatan interoperabilitas militer dengan Amerika Serikat, penguatan deterrence di Natuna, serta fasilitasi dialog keamanan regional. Namun demikian, berbagai tantangan seperti persepsi pro-Barat Indonesia, eskalasi aktivitas Tiongkok, dan ketegangan trilateral masih menjadi hambatan utama.

Kata kunci: Super Garuda Shield, Diplomasi, Laut Natuna Utara

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the impact of the Super Garuda Shield Joint Exercise on Indonesia-China defense diplomacy in the North Natuna Sea, a maritime disputed area due to China's overlapping claims within Indonesia's EEZ. The focus of this research is on how Indonesia and the United States engage in the joint exercise and how it can influence bilateral defense diplomacy strategies, including as a political signal of balance of threat against China's claims..

The perspective used is neoliberalism with a state-level analysis, and Stephen Walt's balance of threat theory as the main conceptual framework. This study finds that the Super Garuda Shield Joint Exercise serves as an instrument to enhance Indonesia's defense capabilities and a political signal to balance the Chinese threat, while strengthening its bargaining position in bilateral diplomacy. This role includes increasing military interoperability with the United States, strengthening deterrence in Natuna, and facilitating regional security dialogue. However, various challenges such as Indonesia's pro-Western perception, escalating Chinese activity, and trilateral tensions remain major obstacles.

Keywords: *Super Garuda Shield, Diplomacy, North Natuna Sea*

PENDAHULUAN

Konflik Laut Natuna Utara merupakan konflik berkepanjangan yang dimulai saat Tiongkok melakukan klaim sepihak dengan membuat sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang dimana wilayahnya mencakup beberapa negara di ASEAN, hal ini juga menjadikan beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dsb melakukan klaim kembali atas wilayah tersebut. Meski Indonesia tidak mengakui adanya sengketa karena merasa hak hukumnya jelas, Tiongkok tetap mengirim kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan tersebut, memicu ketegangan diplomatik dan militer sejak awal 2010-an. Konflik ini mencerminkan dinamika yang lebih besar di Laut Natuna Utara, di mana kekuatan nasional, keamanan maritim, dan kepentingan ekonomi berbenturan, yang menjadikan Indonesia untuk memperkuat pertahanannya sambil tetap mengutamakan jalur diplomasi yang benar.¹

Peningkatan tindakan agresif yang

dilakukan oleh Tiongkok menjadi perhatian bersama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim wilayah di Laut Natuna Utara, aktivitas kapal nelayan Tiongkok yang kerap memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara sering kali dengan pengawalan dari *China Coast Guard* telah mendorong Indonesia untuk menegaskan Latihan Gabungan ini bermula saat Indonesia dengan Amerika Serikat merencanakan kerjasama militer dengan mengadakan latihan gabungan *Garuda Shield* untuk memperkuat hubungan kedua negara dan memastikan Indonesia dengan sistem non-blok, demi menjaga pertahanan dan keamanan regionalnya.²

Super Garuda Shield memiliki cakupan yang lebih luas, yang dimana latihan gabungan ini bersifat multilateral yang melibatkan Amerika Serikat, negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Australia. Cakupan latihan diperluas menjadi lebih

¹ Novianto, R. D. dkk. "Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara." *Jurnal Hukum Bisnin Bonum Commune*. Vol. 5 (No. 2). 2020, hlm 69-78.

² Rusydi. M. R. & Radhiansyah. E. "Efek Latihan Garuda Shield Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional*. 2024, hlm 40-41. <https://doi.org/10.31599/40ms3d26>

komprehensif, mencakup berbagai jenis operasi, yaitu operasi darat, laut, udara, hingga domain siber. Skala latihannya juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan melibatkan puluhan ribu personel dari berbagai negara dan durasi yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama dua hingga tiga minggu. Lokasi pelaksanaan latihan pun lebih bervariasi, memanfaatkan berbagai wilayah strategis di Indonesia.³

Latihan gabungan *Super Garuda Shield* memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan *Garuda Shield*. *Super Garuda Shield* mencakup latihan yang lebih kompleks dengan jenis latihan dan tujuan berbeda. Pada awalnya *Garuda Shield* memiliki tujuan untuk mengatasi dan mengurangi konflik yang ada. Hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya *Garuda Shield*. Hal ini terus berlanjut sampai pada 2022, latihan ini diganti namanya menjadi *Super Garuda Shield* yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik salah satunya pada Laut Natuna Utara.⁴

Kepentingan nasional Indonesia meliputi perlindungan kedaulatan, peningkatan kapasitas pertahanan, serta kontribusi terhadap stabilitas Kawasan. Hal ini mencakup ketegangan sengketa Laut Natuna Utara yang melibatkan beberapa negara sehingga tujuan Indonesia disini ialah untuk menjalin kerjasama serta memiliki dukungan dari negara lain jikalau terjadi ketegangan di kawasan tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara yang terkena dampak penjajahan, Indonesia juga terkena dampak pilarisasi kekuatan sistem Internasional pada masa perang dingin, hal ini yang menjadikan Indonesia memiliki kepentingan nasionalnya dengan membuat

politik luar negrinya menjadi Bebas Aktif.⁵ Pada Kawasan Asia-pasifik kepentingan strategis yang tinggi bagi banyak negara besar, contohnya Amerika Serikat dan Indonesia. Kawasan Asia-Pasifik, merupakan salah satu Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, sengketa Laut Natuna Utara merupakan salah satu contoh ketegangan yang terjadi di Kawasan ini. Hal ini menjadikan persaingan strategis yang menjadikan negara bertindak lebih keras terutama dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada *Super Garuda Shield*.⁶

KERANGKA TEORI

Balance of Threat Theory

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Keseimbangan Ancaman (*Balance of Threat Theory*) yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Teori yang mengukur negara dalam membentuk aliansi mereka jika terjadinya ancaman yang akan datang secara dari konflik eksternal. Teori ini terbagi menjadi dua model yakni *Balancing* dan *Bandwagoning*.

Balancing dapat diartikan sebagai bersekutu dengan pihak lain dengan tujuan untuk melawan ancaman yang lebih besar. Didalam *balancing* contohnya seperti Indonesia mencari pihak seperti Amerika Serikat untuk membantu dalam ancaman besar di Laut Natuna Utara, sehingga Indonesia dapat melawan ancaman-ancaman yang ada dalam konflik tersebut. *Balancing* cenderung lebih sering digunakan dibandingkan *bandwagoning*. *Balancing* pada dasarnya kerjasama antar negara dengan negara lainnya.

Bandwagoning berbanding terbalik dengan *balancing* yang dimana

³ Montolalu, R. R. K. dkk. "The Operational Impacts Of The US Indonesia Strategic Partnership On The Joint Military Exercises Garuda Shield." (2023), hlm 215-217.

<https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.459>

⁴ *ibid*

⁵ Portal Informasi Indonesia. Super Garuda Shield 2024: Strategi Penguatan Militer dan Kerjasama Internasional. 2024. Diakses dari:

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8320/super-garuda-shield-2024-strategi-penguatan-militer-dan-kerja-sama-internasional?lang=1>

⁶ *Ibid*

bandwagoning adalah berpihak kepada sumber ancaman itu sendiri. Maksud dari “bersekutu dengan ancaman” yakni, didalam konflik yang ada pasti ada satu negara yang menjadi kekuatan utama yang menjadi akar permasalahan konflik, didalam *bandwagoning*, kita bersekutu dengan negara tersebut atau bergabung dengan ancaman. Hal tersebut biasa dilakukan sebuah negara dikarenakan takut kalah/mencari keuntungan atau bahkan negara tersebut merasa tidak sanggup untuk melawan kekuatan yang lebih besar sehingga mereka terpaksa untuk masuk kedalam “ancaman” tersebut.⁷

Walt menghubungkan *balancing* dan *bandwagoning* dengan menyatakan bahwa negara umumnya memilih untuk menyeimbangkan atau bersekutu melawan negara yang mengancam. Negara yang lebih kuat cenderung memilih *balancing* dengan negara-negara lemah, sementara negara lemah biasanya menyeimbangkan atau bersekutu dengan negara lemah lainnya tetapi melakukan *bandwagoning* ketika menghadapi ancaman dari negara kuat (ancaman eksternal).⁸

Jika dilihat dari teori *balance of threat* yang dikemukakan oleh Walt, latihan gabungan militer yang dilaksanakan oleh Indonesia merupakan *balancing*, hal ini dapat dinilai dimana terbentuknya *Super Garuda Shield* untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Indonesia dengan Amerika Serikat melakukan hubungan kerjasama terlebih dahulu untuk “melawan ancaman yang lebih besar” pada kasus ini, Tiongkok. Hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Tiongkok yang tidak terlalu baik, menjadikan Amerika Serikat dengan Indonesia melakukan kerjasama tersebut, hal ini juga diperkuat dengan tidak ikut sertanya Tiongkok dalam latihan gabungan ini. Merujuk pada empat aspek menurut Walt, serta menyesuaikan skor intensitas latihan *Super Garuda Shield* setiap

tahunnya. Selain itu, indeks sikap diplomasi dibuat dari empat aspek yang diukur lewat analisis dokumen resmi, yaitu rujukan hukum, ketegasan bahasa, koordinasi, dan keterbukaan data. Dalam tahap awal, penelitian menggunakan metode sederhana untuk melihat hubungan dasar antar variabel berdasarkan waktu. Kemudian, dilakukan analisis lebih dalam dengan cara menelusuri proses penyebab (*process tracing*). Bukti terkuat yang dicari adalah pernyataan kebijakan yang menunjukkan kaitan antara peningkatan kapasitas militer dan kerja sama dari latihan dengan posisi Indonesia dalam merespons situasi di Natuna. Metode ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana latihan militer dan diplomasi berpengaruh terhadap strategi dan tindakan Indonesia.

Asumsi utama teori Neorealisme adalah Negara-negara, sebagai unit utama tindakan dalam struktur internasional, adalah aktor rasional dan satu kesatuan yang berupaya, paling tidak, mendapatkan keamanan (yang menjadi perhatian utama mereka), dan paling tinggi, hegemonia global. Sistem negara-negara bersifat anarkis. Negara-negara tidak dibedakan berdasarkan fungsi mereka, melainkan oleh kemampuan (kekuatan) mereka.

TINGKAT ANALISIS: DOMESTIK

Dengan mempertimbangkan tingkat analisis negara atau domestik, penelitian mengenai “Pengaruh Latihan *Super Garuda Shield* terhadap diplomasi pertahanan Indonesia-Tiongkok dengan studi kasus Laut Natuna Utara” dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana keefektivitasan dari kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam latihan gabungan ini. Pada tingkat analisis negara atau domestik, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana kerjasama yang terjalin dalam Latihan Gabungan Militer *Super Garuda*

⁷ International Affairs Forum. Stephen M. Walt's Notion of Threat. Diakses dari: [https://www.ia-](https://www.ia-forum.org/Content/ViewInternal_Document.cfm?contenttype_id=5&ContentID=8663)

[forum.org/Content/ViewInternal_Document.cfm?contenttype_id=5&ContentID=8663](https://www.ia-forum.org/Content/ViewInternal_Document.cfm?contenttype_id=5&ContentID=8663)

⁸ *ibid*

Shield, berkontribusi terhadap diplomasi Indonesia dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara, khususnya dalam penguatan kapasitas pertahanan dan stabilitas internal.

Analisis ini mencakup peran pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam memanfaatkan latihan ini sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan interoperabilitas militer, modernisasi alutsista, dan kesiapan menghadapi ancaman keamanan multidimensional. Selain itu, latihan ini akan dievaluasi dalam konteks keberlanjutan reformasi pertahanan dan pengaruhnya terhadap persepsi publik domestik terkait keamanan nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengukur pengaruh latihan gabungan sebagai bagian dari kebijakan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan serta menciptakan stabilitas politik dan sosial di dalam dan luar negeri. Penelitian ini juga akan menilai dari pengaruh latihan gabungan ini dalam diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Menurut John W. Creswell metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan data berdasarkan natural setting, serta gambar dan teks yang digunakan sebagai alat penunjang dan memiliki beragam desain penelitian. Lalu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk meninjau data secara keseluruhan. Pada penelitian ini akan melihat Latihan gabungan *Super Garuda Shield* ini efektif atau berdampak dengan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara, serta melihat diplomasi Indonesia dengan

Tiongkok dengan adanya Latihan gabungan *Super Garuda Shield*.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat *Super Garuda Shield*

Kawasan Indo-Pasifik menghadapi ancaman mendadak seperti konflik Laut Natuna Utara akibat klaim sepihak Tiongkok, yang mengancam stabilitas regional. Latihan Gabungan *Garuda Shield* dimulai pada 2007 sebagai program bilateral Indonesia-AS untuk meningkatkan interoperabilitas dan kapabilitas menghadapi ancaman. Kebijakan AS *Pivot to Asia* (2011) memperkuat hubungan ini, merespons dominasi Tiongkok, dengan Latgab sebagai alat deterrence yang melibatkan negara lain seperti Filipina (Balikatan/Phiblex).¹⁰

Latihan gabungan *Super Garuda Shield* antara Indonesia dan Amerika Serikat, masing-masing negara mengerahkan personelnnya masing-masing untuk ikut serta, pada umumnya jumlah personel dari Indonesia lebih banyak dibandingkan AS. Hal ini juga berbeda pada tahun 2021 yang sudah mulai menjadi multilateral dengan jumlah yang banyak tidak hanya dari Indonesia dan AS, tetapi juga dari negara-negara lainnya yang ikut serta menjadi peserta.

Setelah 2 tahun dilaksanakannya latgab *Garuda Shield* antara Indonesia dan Amerika Serikat (2007-2008). Untuk pertama kalinya pada tahun 2009 dan 2010 latgab ini dilaksanakan secara multinasional dengan peserta Amerika Serikat, Australia, Banglades, Filipina, Indonesia, Jepang, Jerman, Kamboja, Malaysia, Mongolia, Nepal, Republik Korea, Selandia Baru, Singapore, Thailand, Tonga, dan Vietnam. Jika dilihat dari efek deterrence, pelaksanaan latgab secara multinasional dapat memperkuat

⁹ Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications. hlm.153-154

¹⁰ Blackwill, R. D. *The U.S. Pivot to Asia and American Grand Strategy*. Council on Foreign

Relations. Diakses dari:
<https://www.cfr.org/project/us-pivot-asia-and-american-grand-strategy>

Indonesia. Hal ini dilihat dari sikap Tiongkok yang menanggapi latgab ini sebagai ancaman di kawasan Laut Natuna Utara. Latgab yang bersifat multinasional memiliki dampak yang beragam, jika kita memakai perspektif Indonesia, tentunya Indonesia akan diuntungkan karena memiliki sekutu dalam kasus ini, Amerika Serikat.¹¹ Jika di lihat dari perspektif Tiongkok, tentunya latgab *Garuda Shield* merupakan ancaman, karena bisa saja Tiongkok beranggapan, latgab ini merupakan strategi dari Amerika Serikat untuk melawan Tiongkok, hal ini juga diperparah dengan adanya kebijakan Amerika Serikat pada tahun 2011.

Setelah kembali menjadi latihan bilateral antara Indonesia-AS, latihan ini memiliki tujuan dan pelatihan yang sama pada setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 latihan ini dilaksanakan secara daring dikarenakan adanya COVID 19 kala itu yang menjadikan latihan ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB. Pada tahun 2021 merupakan pertama kalinya Latihan di luar pulau Jawa dan tempat yang berganti-ganti, yakni Puslatpur Kodiklatad di Baturaja, lalu Daerah Latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Manado, dengan personil terbanyak dari sepuluh dekade sebelumnya, 2161 personil (Indonesia) dan 1547 personil (AS), *Garuda Shield* kembali berfokus kepada Kawasan Indo-Pasifik dan menelaah persepsi ancaman pada wilayah tersebut serta mendukung wilayah Indo-Pasifik menjadi lebih bebas serta aman dari ancaman.

Pada tahun 2022 nama *Garuda Shield* yang sudah dipakai lebih dari satu dekade diubah menjadi *Super Garuda Shield*, yang menjadikan latihan ini kembali menjadi multilateral, Super

Garuda Shield juga mencakup lebih banyak negara yang terlibat. Pada tahun 2022, fokus latihan ini kembali pada stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik serta penguatan diplomasi pertahanan. Pada 2022, latihan ini diselenggarakan di Pulau Sumatra khususnya di Batu Raja, Sumatra Selatan. Latihan ini diikuti oleh Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Mengingat pada tahun 2022 ini merupakan kembalinya latihan Super *Garuda Shield* menjadi multilateral yang melibatkan banyak negara yang tidak hanya Asia Tenggara tetapi negara seperti Jerman, Australia, Jepang, dan negara-negara besar di luar Asia Tenggara. Pada tahun ini mencakup seperti mencakup berbagai kegiatan operasional di darat dan laut, seperti latihan amfibi, keamanan maritim, operasi di lingkungan perkotaan, pertahanan udara, operasi penyerbuan udara, dan penguasaan landasan udara. Selain itu, latihan komando pos juga dilakukan untuk melatih kemampuan merencanakan, memimpin, dan berkomunikasi antar pasukan dalam lingkungan operasi yang disimulasikan an koordinasi efektif dalam menghadapi beragam tantangan keamanan modern di kawasan Indo-Pasifik.¹²

Penamaan Laut Natuna Utara

Penamaan Laut Natuna Utara sendiri, telah diubah oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 yang dimana sebelumnya menggunakan penyebutan Laut China Selatan. Lebih lanjut, Indonesia juga mencantumkan Laut Natuna Utara pada peta nasional Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tujuan Indonesia mengganti sebutan ini antara lain, untuk tidak mendukung serta menunjukkan ketidaksetujuan dengan klaim Tiongkok . Selain itu Kawasan Laut Natuna Utara

¹¹ Puspen*Garuda Shield-09 Wujudkan Harmonisasi Troop Contributor Country*. Tentara Nasional Indonesia. . (2009). Diakses dari: <https://tni.mil.id/view-14449-garuda-shield-09-wujudkan-harmonisasi-troop-contributor-country.html>

¹² Montolalu, R. R. K. dkk. "*The Operational Impacts Of The US Indonesia Strategic Partnership On The Joint Military Exercises Garuda Shield.*" 2023, hlm 215-217. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.459>

merupakan ZEE dari Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 yang memberikan hak bagi Indonesia untuk mengeksplorasi serta memanfaatkan sumber daya laut hingga batas 200 mil laut dari garis Pantai.¹³

Tiongkok dan Eskalasi Konflik di LNU

Indonesia menetapkan bahwa tidak pernah mengklaim atas Laut Natuna Utara, Indonesia berpegang teguh dengan UNCLOS 1982 yang telah dijalani. Indonesia berpendapat bahwa dengan adanya UNCLOS 1982 tersebut, Laut Natuna Utara memang milik Indonesia tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Meskipun begitu, Tiongkok selalu mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan bagian dari *nine dash line* mereka, yang dimana hal tersebut juga melanggar *traditional fishing ground* oleh kapal nelayan coast guard Tiongkok. Pengaruh Tiongkok ini bukan hanya merugikan Indonesia, tetapi dapat merugikan negara-negara kawasan yang berbatasan langsung dengan *nine dash line* yang dikeluarkan Tiongkok, hal ini juga semakin kompleks dengan Tiongkok yang menaruh kapal militer *beserta China Coast Guard* (CCG) di perairan tersebut, menandakan Tiongkok siap untuk melawan jika ada negara yang mengintervensi wilayah tersebut.

Dengan adanya *China Coast Guard* tersebut dan sudah adanya Undang-Undang yang mengatur CCG menjadikan kapal-kapal asing yang melewati daerah Laut Natuna Utara menjadi berbahaya. CCG sendiri merupakan “Angkatan laut kedua Tiongkok” dan memiliki sub-biro di Laut Tiongkok Selatan, Utara, dan Timur, yang menjadi masalah adalah adanya pengaruh dari CCG di Laut Tiongkok Selatan/Laut

Natuna Utara, dimana dalam UU CCG Pasal 21: Tindakan seperti pengusiran paksa dapat dilakukan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan oleh kapal militer asing, dll. Dalam UU tersebut menyebutkan wilayah-wilayah yang mencakup yuridiksi CCG seperti zona tambahan dan ZEE Tiongkok, tetapi Laut Natuna Utara merupakan perairan dan wilayah sengketa bagi banyak negara, yang sebenarnya Tiongkok tidak boleh melakukan intervensi khusus wilayah tersebut.¹⁴

Pada tahun 2013 banyak kapal-kapal asal Tiongkok yang memasuki daerah Laut Natuna. Hal tersebut tentunya ilegal. Hal yang sama kembali terulang ditahun 2019 dan juga tahun 2020, dimana Tiongkok berhasil masuk kedalam wilayah ZEE Indonesia tanpa izin. Tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok yang semakin meningkat merupakan ancaman yang serius bagi Indonesia, baik dalam ekonomi dan politik, ditambah lagi dengan adanya latihan *Super Garuda Shield* yang dilaksanakan dengan Amerika Serikat menjadikan Tiongkok menganggap latihan tersebut merupakan bagian dari Amerika Serikat untuk melawan mereka dalam segi kekuasaan regional. Perilaku nelayan dari Tiongkok tersebut mendapatkan dukungan langsung dari CCG¹⁵. Di dalam buku putih Tiongkok 2019 menjelaskan perang informasi dan intelijen yang memiliki fokus terhadap perkembangan persenjataan dan peralatan presisi jarak jauh, yang dipadukan dengan persenjataan tak berawak dan teknologi kecerdasan. diketahui juga dimana Tiongkok dan Amerika Serikat yang hubungan politik mereka yang tidak begitu bagus.

Tiongkok juga telah mengadopsi

¹³ Maatiri, O. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Utara Antara Indonesia dan Cina”. *Lex Administratum*. Vol. 11 (No. 5). 2023.

¹⁴ Ministry of Defense. *The Coast Guard Law of the People's Republic of China*. The Government of Japan. Diakses dari: https://www.mod.go.jp/en/d_act/sec_env/ch_ocn/index.html

¹⁵ Hanafiah, L., Anwar, S., & Sudibyo, S. “Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 6 (No. 2). 2025, hlm 250-262.

<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.686>

berbagai pendekatan untuk menegaskan klaim kedaulatannya di Laut Natuna Utara. Pertama, Tiongkok membangun pulau-pulau buatan yang berfungsi sebagai pangkalan kekuatan militer dengan tujuan untuk memperluas jangkauannya ke negara-negara di Asia Tenggara. Kedua, Tiongkok mengkombinasikan berbagai instrumen, termasuk diplomasi, informasi, ekonomi, militer, paramiliter (seperti penjaga pantai), serta pengaruh sosial dalam upaya terintegrasi untuk memperkuat klaimnya. Ketiga, Tiongkok menjalankan aksi bertahap, yang disebut "*slicing & gray zone*" yang secara perlahan mengikis kepemilikan pulau oleh negara klaim lain, sekaligus menerapkan strategi "*talk and take*" yaitu mengambil keuntungan politik dari hasil pembicaraan bilateral tanpa melibatkan pihak lain. Keempat, Tiongkok menggunakan pendekatan konfrontasi langsung untuk menguasai secara *de facto* wilayah yang diinginkannya, contohnya terhadap Filipina dan Vietnam. Kelima, Tiongkok mendorong warga negaranya untuk menetap dan beraktivitas di pulau-pulau buatan. Keenam, Tiongkok menafsirkan kembali aturan hukum maritim, khususnya UNCLOS 1982, untuk menegaskan prinsip *free navigation* dan mengatur aktivitas militer di zona tertentu sesuai kepentingannya.¹⁶

Dari beberapa kasus diatas merupakan beberapa contoh yang menjadikan konflik ini berkepanjangan. Hal tersebut berani dilakukan Tiongkok dikarenakan adanya klaim *nine dash line* sehingga mereka berhasil memasuki perairan Indonesia. Dilain sisi, Indonesia juga mempunyai UNCLOS 1982 yang menjadi unsur utama kekuatan Indonesia terhadap Laut Natuna Utara. Dengan banyaknya kapal ilegal Tiongkok yang masuk ke Perairan Natuna, Eskalasi konflik di Kawasan tersebut tumpang tindih klaim antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia yang sah berdasarkan UNCLOS 1982 dengan klaim sepihak *nine-dash line* oleh Tiongkok.

Kondisi ini memicu ketegangan berulang, terutama dengan masuknya kapal nelayan Tiongkok yang kerap dikawal oleh CCG ke wilayah perairan Natuna. Sebagai respon, Indonesia memperkuat kehadiran aparat keamanan, mulai dari pengerahan TNI AL, Bakamla, hingga patroli udara untuk menjaga kedaulatan maritim. Hal tersebut masih merupakan beberapa contoh isu antara Indonesia dan Tiongkok di Kawasan Laut Natuna Utara. Setidaknya ada beberapa negara di Kawasan yang memiliki kasus sama bukan hanya dengan Tiongkok, tetapi antar negara seperti Indonesia dengan Vietnam pada 2025 yang dimana terdapat 2 kapal Vietnam yang memasuki ZEE Indonesia, meskipun kedua negara tersebut sudah mencapai kesepakatan pada tahun 2022.

Respon dan Kebijakan Indonesia

Melihat masalah ini, Indonesia sendiri dapat melakukan strategi *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) dapat diterapkan oleh Indonesia pada level strategis militer untuk memperkuat pertahanan di Laut Natuna Utara. Strategi ini bertujuan untuk menghalau upaya Tiongkok melakukan operasi militer di wilayah tersebut dengan mengungguli kemampuan mereka tanpa kehilangan titik kekuatan utama. Indonesia dapat mempersiapkan badan pertahanan dengan meningkatkan jangkauan dan kemampuan sensor serta sistem senjata yang dimiliki. Selain itu, pengembangan doktrin militer yang relevan, pelatihan personel secara rutin dan intensif, dan perencanaan strategi tempur yang matang diperlukan agar strategi ini dapat berjalan efektif. Pada level strategis militer, strategi A2/AD berfungsi untuk mencegah atau menahan musuh dari menguasai wilayah, meskipun tidak harus melumpuhkan musuh secara

¹⁶ Santoso, T. I. "Aksi agresivitas cina pada zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara:

Perspektif tugas pokok TNI." Jurnal Lemhannas RI. Vol. 8 (No. 1). 2020, hlm 34-46.

keseluruhan.¹⁷

Indonesia sendiri tidak mempunyai Undang-Undang resmi yang secara khusus mengatur untuk sengketa pada Laut Natuna Utara, sehingga Indonesia hanya mengandalkan UNCLOS 1982, Perpres No. 41 Tahun 2022, dan UU Kemaritiman sebagai pegangan bagi pertahanan internasional di wilayah tersebut. UU Kemaritiman Indonesia masih lemah dalam mengawasi sumber daya kelautan, negara belum mampu memaksimalkan pengembangan dan penjelajahan kelautan. Sebaliknya, sebagian besar kemajuan yang dicapai negara ini terjadi di bidang lahan, alhasil memperburuk kesenjangan pembangunan yang ada di seluruh negeri. Setelah Indonesia resmi diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menyusun perangkat hukum yang mampu menjamin keamanan pulau-pulau sekaligus melindungi laut teritorialnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, yang menjadi landasan hukum internasional bagi Indonesia dalam mengatur dan mengelola wilayah maritimnya. Namun, proses penetapan batas wilayah laut bukanlah hal yang mudah.¹⁸

Kepentingan Nasional Indonesia-AS Pada Latgab Super Garuda Shield

Indonesia memiliki kepentingan pada Laut Natuna Utara yang statusnya masih bersengketa sehingga Indonesia membutuhkan aliansi, bukan untuk menyerang secara langsung, tetapi untuk pertahanan serta keamanan di kawasan tersebut. Amerika Serikat sendiri merupakan negara adidaya yang khawatir

akan integritas mereka, sehingga setelah melihat beberapa peluang, akhirnya bekerjasama serta membangun aliansi dengan Indonesia yang dianggap dapat menjadi langkah yang bagus. Amerika Serikat akan menjalin kerja sama yang erat dengan mitra-mitra yang memiliki pandangan serupa guna memastikan kawasan tersebut tetap terbuka dan dapat diakses, serta agar perairan dan ruang udara di kawasan tersebut diatur dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum internasional. AS juga akan membangun dukungan untuk penerapan pendekatan berbasis aturan dalam pengelolaan wilayah maritim, termasuk di Laut Natuna Utara.¹⁹

Kepentingan nasional Indonesia dengan Amerika Serikat dengan mengadakan latgab *Super Garuda Shield* berfokus dengan sumber daya domestik dari masing-masing negara. Hal yang menjadi sebuah kepentingan dari Amerika Serikat mencakup dengan kemandirian nasional, keselamatan publik, keamanan ekonomi nasional yang secara fungsi dapat untuk aman serta adanya sumber daya utama. Sama halnya dengan Indonesia yang memiliki kepentingan untuk mengamankan sumber daya ekonomi, serta melindungi keselamatan warga negara yang dikelola melalui pertahanan negara yang hal ini merupakan kewajiban serta fungsi dari pemerintah khususnya pada bidang pertahanan.²⁰

Strategi Balancing Indonesia Terhadap Ancaman Tiongkok Melalui SGS

Setelah melihat permasalahan yang ada dan memperkuat tujuan nasionalnya, Indonesia kemudian melakukan dapat melakukan evaluasi terhadap dampak potensial dari berbagai alternatif kebijakan yang sudah diidentifikasi. Dalam konteks

¹⁷ Manek, B. G. A. "Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara." *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11 (No. 2). 2023, hlm 105-111. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.431>

¹⁸ Laksono, M. P., & Fairuzzaman, F. "Menelisis Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional." *Simbur Cahaya*. Vol. 31 (No. 1). 2024, hlm 70-85.

<https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318><https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318>

¹⁹ Achmadi, T (2022). *Indonesia's Maritime Policy*. ITS Press

²⁰ Rusydi, M. R. & Radhiansyah, E. *Efek Latihan Garuda Shield Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia*. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 10 (No.1). 2024. <https://doi.org/10.31599/40ms3d26>

ini, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa opsi, seperti melanjutkan dialog bilateral dengan Tiongkok, memperkuat kemampuan militer secara mandiri, serta memperluas kerja sama multilateral melalui latihan gabungan seperti *Super Garuda Shield*. Evaluasi ini mencakup analisis mendalam terhadap konsekuensi strategis, politik, dan keamanan dari masing-masing opsi.

Pertama, memperkuat kemampuan militer secara mandiri menjadi pilihan strategis yang penting dalam rangka menegaskan kedaulatan dan mempertahankan wilayah laut Indonesia secara langsung. Indonesia telah meningkatkan anggaran pertahanan dan modernisasi alutsista untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan patroli di Laut Natuna Utara. Meski demikian, keterbatasan sumber daya dan perbedaan kapasitas dengan Tiongkok yang memiliki anggaran militer terbesar kedua di dunia menjadi tantangan nyata, sehingga penguatan militer mandiri harus diimbangi dengan strategi lain untuk mengoptimalkan efeknya.

Kedua, memperluas kerja sama multilateral, khususnya melalui latihan gabungan seperti *Super Garuda Shield* yang melibatkan Amerika Serikat dan mitra-mitra lain di kawasan Indo-Pasifik dan negara-negara besar lainnya, menjadi pilihan strategis yang efektif untuk menciptakan efek penangkalan (*deterrence*). Pelatihan bersama ini meningkatkan interoperabilitas angkatan bersenjata Indonesia dan sekutu, serta menunjukkan komitmen kolektif menjaga stabilitas regional. Selain meningkatkan kapabilitas pertahanan, kerja sama multilateral ini juga dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia dengan membangun koalisi yang seimbang dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks.

Walaupun tujuan adanya latgab *Super Garuda Shield*, yang diharapkan menjadi alat sebagai ‘penangkalan’, di satu sisi, Tiongkok masih saja memasuki wilayah Laut Natuna utara dengan adanya CCG yang berpatroli di sekitar Kawasan. Dapat dilihat bahwa Indonesia dapat menindak lebih tegas dan keras kepada pelanggaran Tiongkok pada kawasan tersebut. dengan model *balancing*, Indonesia dapat memperkuat dan menambah armada, alusista, dsb. Hal ini ternilai penting mengingat alusista dan armada Tiongkok yang mutakhir dan modern.

Analisis *Super Garuda Shield* dan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam *Balance of Threat Theory* (*Balancing*)

Tujuan dari model *balancing* ini tidak lain untuk memperkuat keamanan mereka dari ancaman atau intervensi dari pihak atau negara lain. Hal ini dilakukan negara untuk menahan serta mengimbangi ancaman tersebut secara efektif. Model *Balancing* yang dijalankan bukan langsung untuk melawan ancaman tersebut, tetapi lebih ke arah membentuk koalisi, dan aliansi. Model *balancing* ini lebih sering dipakai oleh negara-negara terutama negara kecil yang masih membutuhkan bantuan.²¹

Didalam *Balance of Threat Theory* yang dikemukakan Walt, negara-negara akan membuat aliansi guna menghadapi ancaman yang telah mereka identifikasi dan definisikan. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu negara memiliki kekuatan yang tinggi, mempunyai niat agresif, maka akan timbul upaya untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut. Menurut Walt, negara akan beraliansi dengan kekuatan yang diperkirakan lebih tidak mengancam, guna untuk kerja sama keamanan secara formal maupun informal, serta Latihan Bersama jangka panjang.

²¹ Widian, R. “Revisiting Balance of Threat Theory: The Case of Contemporary Southeast Asia in the Context of Great Power Contestation. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.” Vol. 21 (No. 1).

2025, hlm 52-84.

<https://doi.org/10.26593/jihi.v21i1.9152.53-84>

²²Hal ini sudah jelas dengan tindakan Amerika Serikat yang bekerjasama dengan Indonesia melalui latgab *Super Garuda Shield*. Meskipun terdapat pandangan bahwa beberapa negara di kawasan mungkin memandang Tiongkok maupun Amerika Serikat sebagai potensi ancaman, secara umum negara-negara Asia Tenggara menilai bahwa Amerika Serikat merupakan kekuatan yang lebih tidak mengancam. Walaupun memiliki kapabilitas militer global yang besar, Amerika Serikat secara geografis berjarak cukup jauh dari kawasan dan tidak memperlihatkan perilaku agresif seperti yang kerap ditunjukkan oleh Tiongkok dalam berbagai dinamika regional.

Dalam konteks ini, Indonesia melaksanakan Latihan gabungan *Super Garuda Shield* dengan Amerika Serikat sebagai mitra utama dari tahun 2007 hingga 2022, dengan beberapa anggota atau peserta negara lain yang mengikuti. Latihan yang dilakukan selain untuk memperkuat interoperabilitas militer Indonesia tetapi juga untuk memperkuat serta menjaga keamanan, diplomasi, dan stabilitas kawasan di Indo-Pasifik. Dengan melihat ketegangan yang ada pada Laut Natuna Utara yang saling tumpang tindih. *Balancing* yang dilakukan Indonesia juga memiliki keuntungan untuk Indonesia karena dengan menjalankan model ini Indonesia tetap bisa melaksanakan kepentingan nasionalnya di Laut Natuna Utara yang telah diklaim Tiongkok tanpa adanya intervensi dan gangguan dari negara lain, maka dari itu model *balancing* dianggap lebih aman dan berkelanjutan bagi Indonesia jika dibangun dengan *bandwagoning* yang sifatnya ketergantungan dan terikat dengan negara dominan.

Alasan penulis tidak memilih model lainnya yang telah dikemukakan oleh Walt, yakni *Bandwagoning* pada penelitian ini, dikarenakan konsep dari *bandwagoning*

sendiri adalah negara memilih untuk bersatu dan bergabung dengan pihak atau negara yang dianggap lebih kuat dan menjadi sumber ancaman, hal ini dilakukan negara dengan harapan mendapatkan keuntungan serta perlindungan dari pihak atau negara tersebut. *Bandwagoning* ini bersifat terikat dan ketergantungan dengan negara dominan yang menghasilkan keuntungan hanya pada negara dominan tersebut. Negara yang terlibat model ini harus mengikuti kepentingan dari pihak yang dominan walaupun akan bertolak belakang dengan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Perbedaan dari kedua model ini dapat dilihat banyaknya hal yang bertolak belakang, *balancing* menawarkan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua negara, sementara *bandwagoning* lebih menawarkan sikap dominan salah satu pihak dan akan dapat menguntungkan pihak dominan tersebut. Maka jika dilihat dari Kerjasama yang dilaksanakan Indonesia selama hampir dua dekade dengan Amerika Serikat melalui latgab *Super Garuda Shield*, keduanya menjalankan model *balancing* yang saling mendapatkan keuntungan, Indonesia mendapat keuntungan dengan pelatihan militer Indonesia serta dapat menjaga kestabilan di Indo-Pasifik terutama dengan ancaman di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok. Teori *Balance of Threat* yang dikembangkan Stephen M. Walt berangkat dari asumsi bahwa negara tidak merespons kekuatan semata, melainkan ancaman yang dipersepsikan. Persepsi ancaman dibangun dari empat dimensi utama, yaitu kekuatan agregat, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, serta intensi ofensif. Keempat dimensi ini membentuk kalkulasi strategis suatu negara dalam memilih instrumen yang dianggap efektif untuk menyeimbangkan ancaman.

KESIMPULAN

Super Garuda Shield merupakan

²² Daksueva, O. (2014). The Balance-of-Threat Theory: Implications for the South China Sea. Seaps.

Latihan gabungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 2007 hingga kini. Pada awalnya Latihan *Super Garuda Shield* merupakan Latihan bilateral, Indo-AS dengan nama Garuda Shield, tetapi pada tahun 2022 latihan ini menjadi multilateral dengan Indonesia, Amerika Serikat, dan beberapa negara peserta dan negara pengamat.

Laut Natuna Utara sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia memiliki nilai strategis tinggi dari sisi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, sehingga menjadi pusat sengketa dengan klaim sepihak Tiongkok yang berbasiskan garis sembilan putus-putus (*nine-dash line*). Indonesia menggunakan rezim hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan perundang-undangan nasional sebagai landasan penegakan kedaulatan wilayahnya secara tegas dan sah.

Latihan gabungan *Super Garuda Shield* dalam diplomasi Indonesia dengan Tiongkok bisa terbilang cukup netral bagi kedua negara, walaupun Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki hubungan diplomatik yang tidak terlalu bagus serta Tiongkok yang menganggap Amerika Serikat mencari sekutu di Asia Tenggara. Tetapi hal ini terbukti dengan masih terlaksananya Latihan gabungan *Super Garuda Shield* hingga kini dan masih menjadi salah satu Latihan gabungan militer terbesar di Asia Tenggara. Dengan adanya Latihan ini kawasan Laut Natuna Utara dapat aman dan terhindar dari klaim yang dilakukan Tiongkok dikarenakan salah satu fokus dari Latihan ini adanya keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan melihat fenomena yang ada, Latihan gabungan ini berdampak melalui fokus Latihan yang menuju kepada kawasan konflik tersebut di Laut Natuna Utara. Secara langsung Indonesia membuat aliansinya sendiri dengan negara-negara besar lainnya melalui Latihan ini, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek *deterrence* Indonesia kepada negara lain terlebih pada

Tiongkok, serta dapat menjalani diplomasi di Laut Natuna Utara dan dapat menjaga kawasan tersebut dengan adanya tentara yang lebih berpengalaman dengan Latihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, T (2022). Indonesia's Maritime Policy. ITS Press
- Blackwill, R. D. The U.S. Pivot to Asia and American Grand Strategy. Council on Foreign Relations. Diakses dari: <https://www.cfr.org/project/us-pivot-asia-and-american-grand-strategy>
- Creswell, John W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications. hlm.153-154
- Daksueva, O. (2014). The Balance-of-Threat Theory: Implications for the South China Sea. Seaps
- Hanafiah, L., Anwar, S., & Sudibyo, S. "Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara." Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 6 (No. 2). 2025, hlm 250-262. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.686>
- International Affairs Forum. Stephen M. Walt's Notion of Threat. Diakses dari: https://www.ia-forum.org/Content/ViewInternal_Document.cfm?contenttype_id=5&ContentID=8663
- Laksono, M. P., & Fairuzzaman, F. "Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional." Simbur Cahaya. Vol. 31 (No. 1). 2024, hlm 74, 78. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318>
- Manek, B. G. A. "Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara." Jurnal

- Lemhannas RI, Vol. 11 (No. 2). 2023, hlm 105-111. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.431>
- Ministry of Defense. The Coast Guard Law of the People's Republic of China. The Government of Japan. Diakses dari: https://www.mod.go.jp/en/d_act/sec_env/ch_ocn/index.html
- Montolalu, R. R. K. dkk. "The Operational Impacts Of The US Indonesia Strategic Partnership On The Joint Military Exercises Garuda Shield." (2023), hlm 215-217. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.459>
- Novianto, R. D. dkk. "Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara." Jurnal Hukum Bisnin Bonum Commune. Vol. 5 (No. 2). 2020, hlm 69-78.
- Portal Informasi Indonesia. Super Garuda Shield 2024: Strategi Penguatan Militer dan Kerjasama Internasional. 2024. Diakses dari: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8320/super-garuda-shield-2024-strategi-penguatan-militer-internasional?lang=1dan-kerja-sama->
- Rusydi. M. R. & Radhiansyah. E. "Efek Latihan Garuda Shield Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia." Jurnal Keamanan Nasional. Vol. 10 (No. 1). 2024, hlm 39-78. <https://doi.org/10.31599/40ms3d26>
- PuspenGaruda Shield-09 Wujudkan Harmonisasi Troop Contributor Country. Tentara Nasional Indonesia. . (2009). Diakses dari: <https://tni.mil.id/view-14449-garuda-shield-09-wujudkan-harmonisasi-troop-contributor-country.html>
- Santoso, T. I. "Aksi agresivitas cina pada zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif tugas pokok TNI." Jurnal Lemhannas RI. Vol. 8 (No. 1). 2020, hlm 34-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i1.302>
- Widian, R. "Revisiting Balance of Threat Theory: The Case of Contemporary Southeast Asia in the Context of Great Power Contestation. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional." Vol. 21 (No. 1). 2025, hlm 52-84. <https://doi.org/10.26593/jihi.v21i1.9152.53-84>